

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesenjangan pendapatan merupakan suatu hal yang sering terjadi dalam suatu negara ketika terjadi pemerataan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi, menengah, dan rendah. Ketimpangan inilah yang kemudian menjadi permasalahan, khususnya persoalan ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah. Oleh karena itu, baik di negara maju, berkembang, atau miskin, kesenjangan pendapatan selalu ada.

Disparitas pendapatan menjadi suatu masalah dalam proses pertumbuhan dan pembangunan daerah yaitu ketidakmerataan distribusi pendapatan yang kemudian mengakibatkan terjadinya kesenjangan pendapatan. Dampak negatif dari ketimpangan pendapatan terhadap pembangunan telah mendorong banyak penelitian yang dilakukan guna mencari cara untuk memberantas masalah tersebut. Ketimpangan pendapatan merupakan masalah sosial dan juga masalah ekonomi Martin et al., (2021). Oleh karena itu, disparitas pendapatan merupakan permasalahan multidimensi yang tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Sejumlah penelitian yang mengkaji tentang ketimpangan ekonomi, secara umum disebutkan bahwa faktor penyebab kesenjangan perekonomian dapat dikelompokkan menjadi dua hal, yaitu faktor eksogen (dari luar negeri) dan faktor endogen (dari dalam negeri). Faktor eksogen yang memacu kesenjangan ekonomi adalah globalisasi perdagangan, keuangan dan perubahan teknologi UNDP (2018: 60). Faktor domestik (endogen) yang turut

mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan adalah kebijakan makroekonomi, kebijakan pasar tenaga kerja, ketimpangan kekayaan, kebijakan perpajakan dan transfer, serta belanja pemerintah Buhaerah (2017: 343).

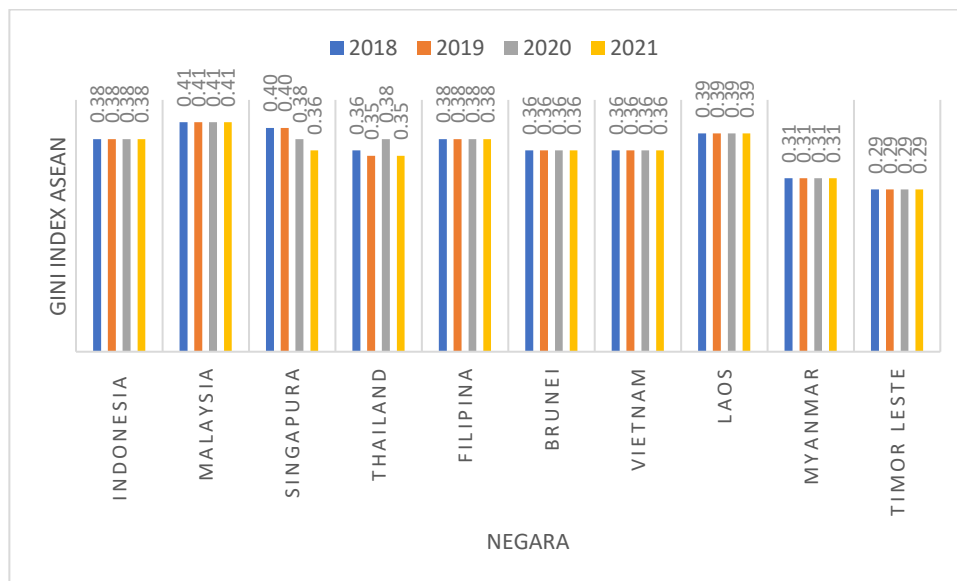
Peningkatan disparitas pendapatan di seluruh dunia merupakan sebuah ancaman terhadap aktualisasi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengurangi kesenjangan (SDG-10). Dalam hal ini, pembangunan keuangan diusulkan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan pembangunan keuangan berkaitan dengan alokasi modal.

Penelitian tentang ketimpangan distribusi pendapatan dan pembangunan keuangan dapat dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, penelitian yang menunjukkan hubungan positif antara pembangunan keuangan dan ketimpangan distribusi pendapatan. Pada penelitian Bittencourt et al. (2019) di Amerika Serikat; Bolarinwa dan Akinlo (2021) di Afrika; Chiu dan Lee, (2019) di 59 negara dengan pendapatan tinggi dan rendah; de Haan dan Sturm, (2017) di 121 negara; dan Singh dan Huang (2015) di Sub-Sahara Afrika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan akan semakin meningkat ketika ada kemajuan keuangan.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Zhang dan Naceur (2019) di 143 negara maju dan berkembang menunjukkan hasil yang berlawanan. Ang (2010) menemukan bahwa pembangunan keuangan berkorelasi negatif dengan ketimpangan distribusi pendapatan, Baiardi dan Morana (2018) di Kawasan Eropa, Harmori dan Hashiguchi (2012) di 126 negara, Clarke et al.

(2006) di 89 negara maju dan berkembang, dan Beck et al. (2007) di 72 negara maju dari berkembang. Ini menunjukkan bahwa pembangunan keuangan memiliki kemampuan untuk mengurangi disparitas pendapatan, atau semakin pemeratakan distribusi pendapatan. Penelitian ini akan menganalisis hasil dari dua kelompok tersebut untuk menentukan mana yang paling sesuai untuk menjelaskan pengaruh pembangunan keuangan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di ASEAN-4.

Umumnya pada banyak penelitian yang telah dilakukan sebelumnya hanya menggunakan sampel dari negara-negara maju seperti kawasan Eropa dan Amerika. Namun, negara-negara lain seperti pada kawasan ASEAN juga sebenarnya menarik untuk diteliti karena isu tersebut tidak hanya menjadi permasalahan di negara-negara maju saja. ASEAN sendiri dapat dikatakan sebagai kawasan yang pertumbuhan ekonomi nya relatif stabil dan dinamis jika dibandingkan dengan kawasan Amerika Latin, termasuk juga dalam hal pembangunan pada sektor keuangan dimana menunjukkan kinerja pertumbuhan yang cukup signifikan. Namun, ASEAN memiliki potensi instabilitas politik dan sosial yang cukup tinggi karena kesenjangan yang kian besar dari tahun ke tahun.



Sumber: World Bank

Gambar 1. 1 Gini Index ASEAN Tahun 2018-2021

Menurut *World Bank*, *gini index* dapat dikategorikan sesuai dengan konvensi umumnya yaitu untuk kategori ketimpangan rendah terjadi pada nilai rasio gini antara 0,2-0,3, sedangkan pada kategori ketimpangan moderat berada pada nilai rasio gini antara 0,3-0,5, dan pada kategori ketimpangan tinggi terjadi apabila nilai rasio gini berada di atas 0,5.

Tabel 1. 1 Matriks Ketimpangan Pendapatan di ASEAN

Kategori Ketimpangan pendapatan	Nilai Rasio Gini	Negara	Keterangan
Ketimpangan rendah	0,2-0,3	Timor Leste	Distribusi pendapatan hampir merata
Ketimpangan moderat/ sedang	0,3-0,5	Myanmar, Laos, Vietnam, Brunei, Filipina, Thailand, Singapura dan Indonesia	Ketimpangan distribusi pendapatan merata sebagian
Ketimpangan tinggi	>0,5	-	Ketimpangan pendapatan hampir merata

Sumber: diolah dari laman website *Corporate Finance Institute*

Negara di Asean menurut data yang diambil dari *World Bank* pada gambar 1.1 dan dijabarkan kembali dalam tabel 1.1 dapat dijelaskan bahwa negara yang masuk kedalam kelompok kategori ketimpangan pendapatan rendah yaitu Timor Leste. Hal ini mungkin disebabkan karena Timor Leste memiliki sumber daya alam unggulan yang melimpah. Negara miskin yang memiliki sumber daya alam yang melimpah memungkinkan untuk mengalami distribusi pendapatan yang lebih merata jika pemanfaatan sumber daya tersebut dikelola dengan adil dan transparan. Faktor lain karena Timor Leste merupakan sebuah negara yang berukuran kecil dan penduduknya masih masuk ke dalam kategori rendah.

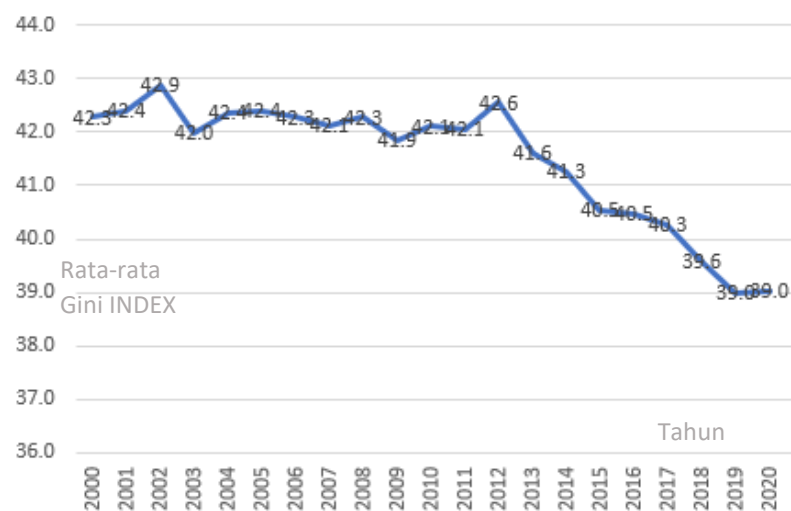
Selain itu, negara yang masuk ke dalam kategori moderat atau sedang yaitu negara Myanmar, Laos, Vietnam, Brunei, Filipina, Thailand, Malaysia, Singapura dan Indonesia.

World Bank mengelompokkan 3 golongan negara berdasarkan pendapatannya, yaitu *high income countries*, *middle income countries*, dan *low income countries*. Ketiga golongan tersebut didasarkan pada *Gross National Income* (GNI) pada setiap negara dengan nilai batas yang telah ditetapkan. GNI mencerminkan total pendapatan yang dihasilkan oleh seluruh penduduk dalam suatu negara. Apabila GNI hanya terkonsentrasi pada sekelompok penduduk kaya, maka hal tersebut akan memicu terjadinya ketimpangan dsitribusi pendapatan.

Sistem penggolongan tersebut juga dapat dilihat pada negara ASEAN sebagai sebuah organisasi yang telah didirikan oleh kelima negara pendirinya sejak 1967 yaitu negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Akan tetapi dari kelima negara tersebut, keempat negaranya masih

masuk ke dalam negara berkembang dengan pendapatan menengah. Padahal tujuan dari didirikannya ASEAN adalah untuk meningkatkan kerjasama untuk memajukan bidang ekonomi. Namun, hanya Singapura yang sudah berhasil menjadi negara maju dengan pendapatan tinggi mendahului 4 negara lainnya. Kondisi tersebut dapat menjadi suatu indikasi dimana keempat negara tersebut berada pada fenomena *middle income trap* yang mana pertumbuhan ekonomi di negara tersebut cenderung lambat. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan pendapatan yang tidak merata di masyarakat. Oleh karena itu, keempat negara tersebut akan menjadi objek penelitian ini yang kemudian disebut sebagai ASEAN-4.

Salah satu masalah ekonomi yang erat kaitannya dengan kemiskinan adalah ketimpangan pendapatan. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan yang sangat besar antara masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah terutama di negara-negara berkembang. Berikut grafik gini index dari tahun 2000-2020 di negara ASEAN-4.



Sumber data: World Inequality Database

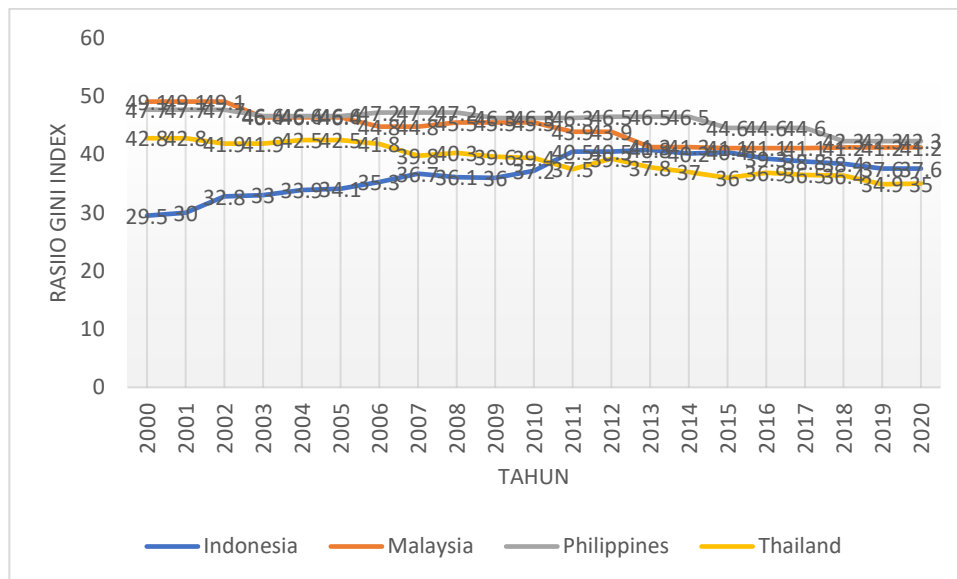
Gambar 1. 2 Grafik Rata-Rata Gini Index Negara ASEAN-4 Tahun 2000-2020

Grafik di atas yang berisi data gini index pada negara ASEAN-4 yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina terlihat bahwa pada rentang waktu 21 tahun rata-rata gini index Negara ASEAN-4 yakni Indonesia, Malaysia, Thailand dan Filipina terlihat mengalami penurunan tren dari tahun ke tahun. Pada data yang didapatkan dari *world bank*, skala yang digunakan adalah skala index dengan rentang angka 0-100% dimana semakin mendekati 100 maka ketimpangan pendapatan akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, jika semakin mendekati nilai 0 maka ketimpangan pendapatan akan semakin rendah.

Rata-rata pada data gini index negara ASEAN-4 masih masuk kedalam kategori moderat yaitu berada pada rentang skala index 30-40%. Jika diubah ke dalam bentuk rasio atau yang biasa disebut dengan koefisien gini yang memiliki ukuran derajat ketimpangan antara 0 (pemeratan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna), maka nilai rasio gini pada data tersebut antara 0,3-0,4 yang mana menurut *World Bank*, ketimpangan pendapatan masyarakat dapat dikatakan rendah jika koefisien gini nya dibawah 0,3. Kemudian dapat disimpulkan bahwasannya ketimpangan pendapatan di 4 negara ASEAN tersebut memiliki rasio gini yang cukup tinggi atau moderat karena nilainya lebih dari 0,3 dalam kurun waktu 21 tahun.

Grafik rata-rata gini indeks yang terjadi di negara ASEAN-4 mengalami penurunan terus menerus. Hal tersebut menjadi pertanda baik yang mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di ASEAN-4 terus menurun dan masuk ke kategori sedang. Ini berarti ketimpangan di negara ASEAN-4 berada di kategori ketimpangan sedang yang berarti ketimpangan pendapatan merata di sebagian masyarakat. Hal tersebut berarti indikator ketimpangan

pendapatan dapat dikendalikan dengan baik di negara ASEAN-4. Menurut *World Bank*, ketimpangan pendapatan dapat terjadi jika terjadinya ketimpangan peluang, ketimpangan pasar tenaga kerja, konsentrasi kekayaan, dan ketimpangan dalam menghadapi guncangan.



Sumber data: World Inequality Database

Gambar 1. 3 Grafik Gini Index Negara ASEAN-4 Tahun 2000-2020

Grafik yang dapat dilihat pada gambar 1.3 dan gambar 1.4, menunjukkan bahwa garis grafik terlihat tidak mengalami kenaikan ataupun pengurangan nilai gini index. Pada 4 tahun terakhir pun nilai gini index pada 4 negara tidak mengalami perubahan dan tetap di kategori sedang. Begitu pula dengan data pada grafik 1.4 yang menunjukkan data variabel dari *financial development* tidak mengalami perubahan. Pada contoh kasus kenaikan index gini di Indonesia pada tahun 2000 sampai 2010, data dari variabel *financial development* tidak terjadi penurunan atau kenaikan. Padahal normalnya jika mengacu pada teori dan penelitian terdahulu, jika variabel *financial development* naik maka ketimpangan turun.

Nilai koefisien gini pada negara-negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina terindikasi cukup bervariasi. Pada data di gambar grafik 1.3 dapat dilihat bahwasannya Filipina dan Malaysia memiliki nilai gini index yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara Indonesia dan Thailand yaitu mencapai lebih dari angka 0,40 dari tahun ke tahun dan tidak pernah mendapatkan angka kurang dari 0,40. Walaupun demikian, kedua negara tersebut berhasil menurunkan tingkat ketimpangan pendapatan. Demikian pula dengan negara Thailand yang serupa dengan kedua negara tersebut walaupun nilai rasionya masih dibawah 0,4 pada 10 tahun terakhir. Agak berbeda dengan Indonesia yang pada awalnya memiliki nilai koefisien gini tergolong rendah, namun pada tahun belakangan ini Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Menurut temuan Odhiambo, (2010), ketika *domestic credit to private sector* (DCP) digunakan sebagai proksi pembangunan keuangan dapat menyebabkan pengurangan kemiskinan. Jika kemiskinan berkurang maka dapat diasumsikan bahwa ketimpangan pendapatan mulai berkurang.

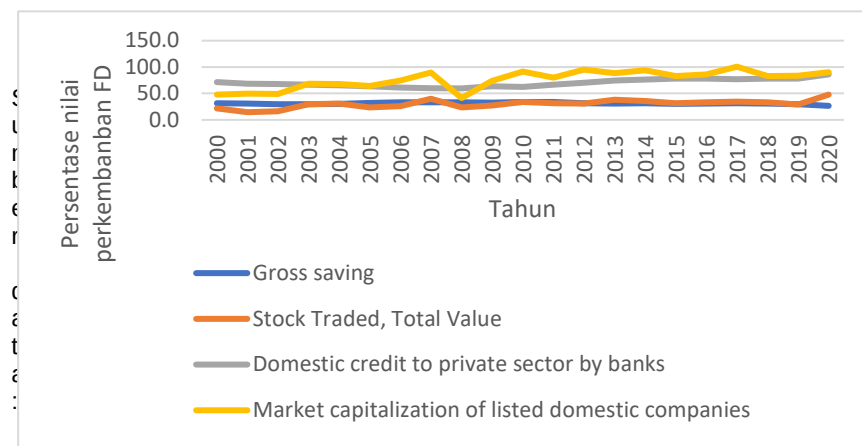
Pada penelitian terdahulu lainnya, Buhaerah (2017) berpendapat bahwa pasar saham mendorong terjadinya konsentrasi pendapatan pada kelompok masyarakat yang berpendapatan tinggi terutama ketika pasar saham mengalami masa keemasan. Kelompok tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk berinvestasi secara besar-besaran pada periode awal masa keemasan pasar saham. Sementara untuk kelompok masyarakat dengan pendapatan lebih rendah baru bisa memasuki pasar saham setelahnya ketika periode keemasan sudah berlangsung cukup lama yang dapat membuat kelompok tersebut mengalami kerugian.

Fitria (2022) berpendapat bahwa tingkat pendapatan masyarakat sangat mempengaruhi tingkat tabungan yang dilakukan oleh masyarakat. Jika tingkat tabungan masyarakat tinggi maka ketersediaan dana yang digunakan untuk konsumsi akan semakin tinggi sehingga jumlah tabungan akan meningkat. Oleh karena itu, makin besar jumlah pendapatan yang diterima masyarakat maka akan semakin besar pula jumlah tabungan yang dilakukan oleh masyarakat tersebut.

Financial development menjadi salah satu jembatan yang dapat mengatasi ketimpangan pendapatan. Penelitian yang dilakukan oleh Park & Mercado (2015) pada negara Asia menunjukkan bahwa hubungan antara *financial inclusion* dan *income inequality* memiliki nilai negatif. Ini artinya inklusi keuangan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Inklusi keuangan sendiri merupakan suatu kondisi dimana masyarakat atau bisnis memiliki akses terhadap produk atau layanan keuangan formal yang berkualitas, aman, dan terjangkau.

Akses terhadap layanan keuangan menjadi sangat penting karena dapat berpengaruh positif terhadap ketimpangan pendapatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Paweenawat (2014), faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Thailand adalah aksesibilitas terhadap sektor keuangan dan *human capital*. Selain itu, institusi keuangan mikro berperan dalam memberikan akses rumah tangga miskin untuk mengakses modal dengan biaya terjangkau untuk melakukan investasi dalam membuka lapangan pekerjaan ataupun untuk mengakses pendidikan.

Sejalan dengan penelitian Purwono et al. (2020: 584), kemudahan aksesibilitas pada sektor keuangan akan menciptakan stabilitas keuangan, pertumbuhan, pengurangan kemiskinan dan pendistribusian sumber daya serta kapasitas yang lebih seimbang.



World Development Indicator/ World Bank

Gambar 1. 4 Grafik Perkembangan Financial Development Pada Negara ASEAN-4 Tahun 2000-2020

Perkembangan sistem keuangan melalui pemberian akses terhadap layanan perbankan seperti *savings*, kredit dan investasi kepada masyarakat dapat mengarah pada pelonggaran hambatan yang dapat menghambat redistribusi modal, sehingga menyebabkan masyarakat miskin memiliki akses terhadap dana untuk kegiatan produktif yang pada akhirnya dapat mendorong pengurangan ketimpangan pendapatan.

Namun, pada kenyataannya beberapa penelitian membuktikan hal sebaliknya. Negara-negara yang mengalami perkembangan keuangan yang stabil telah mencatat peningkatan ketimpangan pendapatan. Pada penelitian

Makhlouf et al. (2020) dikatakan bahwa pembangunan keuangan memperlebar ketimpangan pendaspatan di negara-negara maju.

Seven & Coskun (2016) melakukan penelitian pada negara-negara berkembang dan hasil penelitian tersebut menunjukkan nilai positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa pembangunan keuangan memperburuk ketimpangan pendapatan di negara-negara berpenghasilan rendah dan berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa pada negara-negara berkembang, akses terhadap layanan perbankan bagi masyarakat miskin masih terbatas dibandingkan dengan akses kelompok masyarakat lainnya. Hal tersebut yang mungkin dapat memicu bertambahnya ketimpangan pendapatan.

Untuk mengetahui bagaimana akses layanan keuangan sebagai proxy pembangunan keuangan mempengaruhi ketimpangan pendapatan di ASEAN-4, maka pada penelitian ini akan menggunakan *proxy* pembangunan keuangan seperti pada penelitian sebelumnya namun dilakukan sedikit modifikasi pada penggunaan variabel dengan menyatukan beberapa variabel yang pernah digunakan pada penelitian lain secara parsial. Penelitian ini menggunakan variabel *gross saving*, *stocks traded (total value)*, dan *domestic credit to private sectore by banks*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yaitu penelitian ini menggunakan metode estimasi regresi data panel ECM. Berbeda dengan penelitian lain yang menggunakan regresi data panel seperti pada penelitian Park & Mercado (2015) atau penelitian Abbas et al. (2022) yang menggunakan panel ARDL seperti penelitian Yıldırım (2020).

Selain itu penelitian ini juga menggunakan data negara yang berbeda (ASEAN-4) dengan penelitian yang serupa seperti penelitian Yıldırım (2020) yang melakukan penelitian di Turkiye atau penelitian Azam & Raza (2018) yang melakukan penelitian serupa namun menggunakan data dari negara ASEAN-5.

Variabel yang dipakai pada penelitian ini berbeda karena menggunakan variabel *gross saving*, *stocks traded (total value)*, *domestic credit to private sectore by banks*, dan *stock market capitalization of listed domestic companies* secara simultan. Berbeda dengan penelitian Yıldırım, (2020) yang hanya menggunakan *proxy saving* saja dalam penelitiannya. Atau penelitian Okafor et al. (2023) tidak menggunakan variabel *gross saving* pada penelitiannya. Atau pada penelitian Tran et al. (2020) dan Yıldırım (2020) yang menggunakan variabel tabungan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan gabungan proxy dan variabel yang dilakukan pada penelitian lain yang kemudian dilakukan pengujian secara simultan untuk mengetahui pengaruhnya pada ketimpangan pendapatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu:

Apakah *gross saving*, *stocks traded (total value)*, *domestic credit to private sectore by banks*, dan *stock market capitalization of listed domestic companies* secara simultan berpengaruh signifikan serta terdapat hubungan jangka panjang dan jangka pendek terhadap pengurangan ketimpangan pendapatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah *gross saving*, *stocks traded (total value)*, *domestic credit to private sector by banks* dan *stock market capitalization of listed domestic companies* secara simultan memiliki hubungan jangka panjang dan jangka pendek serta mempengaruhi ketimpangan pendapatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari topik penelitian Pengaruh Perkembangan Keuangan Terhadap Disparitas Distribusi Pendapatan adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara perkembangan keuangan dan disparitas distribusi pendapatan di Indonesia. Penelitian ini dapat memberikan jawaban yang terdapat pada rumusan masalah yang membahas tentang apakah perkembangan keuangan (*financial development*) dapat membantu mengurangi disparitas distribusi pendapatan.

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya tentang topik yang sama atau terkait.